

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN
MANAJERIAL DENGAN VARIABEL KONTROL UKURAN PERUSAHAAN DAN
LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**
(Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2011-2015)
**THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND MANAJERIAL
OWNERSHIP WITH CONTROL VARIABLES FIRM SIZE AND LEVERAGE ON TAX
AVOIDANCE**
(The Study on Automotive subsector Manufacturing Companies listed in Indonesian Stock
Exchange period 2011-2015)

Mella Virgi Amelia¹, Dudi Pratomo², Kurnia³

^{1, 2, 3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
¹mellavirgi@student.telkomuniversity.ac.id, ²dudipratomo@telkomuniversity.ac.id,
³kurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional (INST), kepemilikan manajerial (MANJ), ukuran perusahaan (*SIZE*) dan *leverage* (DER) baik secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak (CETR). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh tujuh perusahaan sampel dengan periode lima tahun sehingga didapat 35 unit sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa INST, MANJ, *SIZE* dan DER dapat menjelaskan variabel dependen CETR 71% sedangkan sisanya 29% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian. Hasil menunjukkan secara simultan INST, MANJ, *SIZE*, dan DER berpengaruh signifikan terhadap CETR. Melalui pengujian secara parsial didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa variabel INST, MANJ, dan *SIZE* tidak berpengaruh terhadap CETR sedangkan variabel DER berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap CETR.

Kata kunci: penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, *leverage*

Abstract

Tax avoidance is an effort by taxpayer to reduce or eliminate tax liability, which does not violate the provisions of tax legislation. This study is to determine the effect of institutional ownership (INST), managerial ownership (MANJ), firms size (SIZE), and leverage (DER) either simultaneously or partially on tax avoidance (CETR). Population in this research is automotive subsector manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2011-2015. Purposive sampling used as sampling technique and obtained seven companies as sample in five years so that obtained thirty five units of samples in this study. Data analysis method in this research is panel data regression analysis.

The results showed INST, MANJ, SIZE and DER can explain the dependend variable tax avoidance 71% while the remaining 29% influenced by other variables outside the research. The results also showed simultaneously INST, MANJ, SIZE and DER significant effect CETR.

The partial test obtained showed that the variables INST, MANJ and SIZE have no significant effect on CETR, while DER variables has a significant effect on CETR with negatif direction.

Keywords: institutional ownership, managerial ownership, firm size, leverage, and tax avoidance

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan

sebagai menyumbang pajak terbesar dalam penerimaan pajak negara. Tetapi perusahaan pasti melakukan apa saja agar perusahaan memperoleh laba yang besar termasuk dengan mengelola beban pajaknya. Karena disatu sisi praktik penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada tetapi disisi lain akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Banyak cara yang dilakukan perusahaan agar dapat membayar pajak dengan sangat rendah, misalnya perusahaan melaporkan beban pajaknya dengan sangat rendah tetapi penjualannya terus meningkat selama tahun tersebut maka perusahaan tersebut terdapat indikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam hal mengurangi adanya praktik penghindaran pajak diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus menerapkan konsep dan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Penerapan *corporate governance* juga berpengaruh dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan terkait dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menginginkan laba yang besar namun laba yang besar tentu akan membayar pajak yang besar pula. Dengan hal itu maka perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak agar bisa membayar pajak rendah dan dengan risiko yang kecil.

2. Dasar Teori

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1 Penghindaran Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Sari, 2013:51).

2.1.1.2 Penyebab Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak

Salah satu penyebab wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak adalah adanya kepentingan yang harus dipenuhi untuk dirinya ataupun keluarganya sehingga mengabaikan tanggungjawabnya kepada negara. Pada saat memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak, pembuat keputusan dalam perusahaan akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang dilakukannya (Chen *at al*: 2008).

2.1.1.3 Pengukuran Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi Tarif Pajak Efektif. Tarif Pajak Efektif merupakan perbandingan total beban pajak dan laba sebelum pajak. Total beban pajak dihitung dengan menjumlahkan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Laba sebelum pajak merupakan laba yang didapat perusahaan yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi keuangan (Zulaikha dan Permana: 2015).

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}} \quad (2.1)$$

2.2 Corporate Governance

A. Teori Keagenan

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Pemisahan ini dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dalam perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.

B. Pengertian Corporate Governance

Center for European Policy Study (CEPS), memformulasikan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi (Sutedi, 2011:1).

C. Pengukuran Corporate Governance

1. Kepemilikan Institusional

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung

pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal kepada perusahaan. Kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{total saham yang beredar}} \quad (2.2)$$

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Pengukuran dilihat dari besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk presentase (Yadnyana dan Wati: 2011). Semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki oleh manajerial, maka semakin baik kinerja perusahaan, dikarenakan hal itu membantu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Pohan: 2009). Kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah saham manajerial}}{\text{total saham yang beredar}} \quad (2.3)$$

2.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva, dan lainnya (Ngadiman dan Puspitasari: 2014). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{total aktiva}) \quad (2.4)$$

2.4 Leverage

Menurut Hery (2016: 162), rasio *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan neraca dengan rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio). Rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Pembiayaan melalui utang terutama utang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari: 2014). *Leverage* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{total liabilities}}{\text{total equity}} \quad (2.5)$$

3. Metodologi

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel yaitu perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015, perusahaan yang memiliki informasi mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage*, perusahaan yang menyajikan laporan dalam satuan mata uang rupiah, dan perusahaan dengan nilai saldo laba negatif. Setelah mengeleminasi terdapat 7 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang persamaannya dituliskan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + X_3\beta_3 + X_4\beta_4 + \varepsilon$$

Di mana,

Y = *Tax avoidance*

α = Konstanta

X_1 = *Foreign investors' interests*

X_2 = Profitabilitas

X_3 = Ukuran perusahaan

X_4 = *Leverage*

β_1, \dots, β_4 = Koefisien regresi

ε = *Error term*

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka model data panel yang digunakan adalah *random effect model*.

Tabel 2
Hasil Pengujian Signifikansi Random Effect

Dependent Variable: CETR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/12/17 Time: 22:07
 Sample: 2011 2015
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 6
 Total panel (unbalanced) observations: 21
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INST	-0.000477	0.001043	-0.457447	0.6535
MANJ	-0.011890	0.006663	-1.784598	0.0933
SIZE	0.008164	0.012431	0.656784	0.5207
DER	-0.111174	0.016398	-6.779753	0.0000
C	0.071809	0.381880	0.188041	0.8532

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.073964	0.9339
Idiosyncratic random		0.019685	0.0661

Weighted Statistics			
R-squared	0.765190	Mean dependent var	0.023849
Adjusted R-squared	0.706488	S.D. dependent var	0.038517
S.E. of regression	0.020885	Sum squared resid	0.006979
F-statistic	13.03506	Durbin-Watson stat	1.705229
Prob(F-statistic)	0.000066		

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.610466	Mean dependent var	0.175619
Sum squared resid	0.107288	Durbin-Watson stat	0.110927

Sumber: Data yang telah diolah (2017)

4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji dari metode *random effect* pada tabel 2, diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,706488 atau 71 %. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* mampu menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 0,706488 atau 71 %, sedangkan sisanya sebesar 0,293512 atau 29 % dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.3 Uji Simultan

Berdasarkan tabel 2 tingkat signifikansi (*Prob F-Statistic*) yang diperoleh sebesar 0,000066 atau dibawah tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa $H_{a.1}$ diterima yang berarti bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

4.4 Uji Parsial

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel. Hasil pengujian uji statistik secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas $0,6535 > 0,05$ menjadikan keputusan yang diambil adalah menerima $H_{0.2}$ sehingga

kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diartikan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik penghindaran pajak dapat terhindarkan. Kepemilikan institusional harusnya memainkan peranan penting dalam membantu, mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari perilaku mementingkan diri sendiri. Tetapi disisi lain kepemilikan institusional cukup diuntungkan apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan membuat profit tinggi yang juga akan mensejahterakan pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Winata (2014) dan Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai probabilitas $0,0933 > 0,05$ menjadikan keputusan yang diambil adalah menerima $H_{0,3}$ sehingga kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial yang tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diartikan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan manajerial tidak membuat praktik penghindaran pajak dapat terhindarkan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan diri sendiri karena manajemen tidak ingin mengambil risiko dengan melakukan hal yang akan merugikan pemegang saham yang termasuk dirinya sendiri. Tetapi proporsi kepemilikan saham oleh manajemen pada perusahaan sampel lebih kecil dari kepemilikan institusional sehingga membuat pihak manajemen tidak memiliki hak yang cukup besar dalam memberikan wewenang dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian analisis deskriptif telah diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Variabel penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif periode 2011-2015 memiliki nilai *mean* sebesar 0,249 dan standar deviasi sebesar 0,102. Nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 0,627 dimiliki oleh PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. pada tahun 2014, sedangkan nilai minimum dimiliki oleh PT. Astra Otoparts Tbk. sebesar 0,101 pada tahun 2012.
 - b. Variabel kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif periode 2011-2015 memiliki nilai *mean* sebesar 61,74 dan standar deviasi sebesar 18,24. Nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 95,65 dimiliki oleh PT. Astra Otoparts Tbk. pada tahun 2011 dan 2012 sedangkan nilai minimum dimiliki oleh PT. Nipress Tbk. sebesar 37,11 pada tahun 2011-2013.
 - c. Variabel kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif periode 2011-2015 memiliki nilai *mean* sebesar 3,24 dan standar deviasi sebesar 6,16. Nilai maksimum kepemilikan manajerial sebesar 24,45 dimiliki oleh PT. Nipress Tbk. pada tahun 2012 sedangkan nilai minimum dimiliki oleh PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. yang tidak memiliki kepemilikan saham oleh pihak manajerial.
 - d. Variabel ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif periode 2011-2015 memiliki nilai *mean* sebesar 29,014 dan standar deviasi sebesar 2,155. Nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 33,134 dimiliki oleh PT. Astra Internasional Tbk. pada tahun 2015 sedangkan nilai minimum dimiliki oleh PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. sebesar 25,784 pada tahun 2011.
 - e. Variabel *leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif periode 2011-2015 memiliki nilai *mean* sebesar 0,932 dan standar deviasi sebesar 0,600. Nilai maksimum *leverage* sebesar 2,384 dimiliki oleh PT. Nipress Tbk. pada tahun 2013 sedangkan nilai minimum dimiliki oleh PT. Indospring Tbk. sebesar 0,248 pada tahun 2014.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan didapatkan hasil sebesar 0,000066 yang berarti bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak diketahui bahwa:
 - a. kepemilikan institusional dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
 - b. Kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
 - c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

- d. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

5.2 Saran

5.2.1 Aspek Teoritis

a. Bagi penulis

Lebih memperdalam wawasan dan pengetahuan tentang kepemilikan institusional, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan *leverage* agar mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat mengetahui faktor yang paling besar mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Selain itu penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan objek yang berbeda serta rentang waktu penelitian yang berbeda sehingga dapat dilihat hasil yang lebih akurat.

5.2.2 Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga dapat mengambil keputusan untuk tindakan penghindaran pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Bagi publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, *leverage*, dan penghindaran pajak untuk menambah pengetahuan.

Daftar Pustaka

- [1] Annisa, Nuralifmida A. Dan Kurniasih, Lulus. (2012). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing vol. 8, (2).
- [2] Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, and T. Shelvin. (2008). *Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily Firms?*. Working Paper, University of Washington.
- [3] Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. (2014). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 hal. 249-260.
- [4] Hanafi, Umi. (2014). *Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Diponegoro Journal Of Accounting, Semarang.
- [5] Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- [6] Muid, Dul dan Santoso, Titus Bayu. (2014). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak*. Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 3 No. 4 hal. 1. ISSN (Online) 2337-3806.
- [7] Ngadiman dan Puspitasari, Christiany. (2014). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Volume XVIII, No. 03, September 2014: 408-421. Jurnal Akuntansi.
- [8] Pohan, Hotman T. (2009). *Analisis pengaruh kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. (4). hal. 113-135.
- [9] Prakosa, Kesit Bambang. (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. SNA 17 Mataram 24-27 September.
- [10] Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- [11] Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- [13] Winata, Fenny. (2014). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013*. Tax & Accounting Review vol.4.
- [14] Yadnyana, I.K. dan N. W. A. E. Wati. (2011). *Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan Manufaktur yang Go Public*. Jurnal keuangan dan perbankan, Vol. XV No. 1, hal. 58-65.
- [15] Zulaikha, dan Permana, Ahmad R. Dwi. (2015). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak*. Diponegoro Journal Of Accounting vol.4 no.4 hal. 1-11 ISSN (online): 2337-3806.